

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI

FORMULIR PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI

A. IDENTITAS PELAPOR			
1.	Nama Lengkap	:	
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:	
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:	
4.	Nama Instansi	:	
5.	Alamat Kantor	:	
		:	Kode POS :
6.	Alamat Rumah	:	
		:	Kode POS :
7.	Nomor Telpon	:	

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI			
1.	Nama Lengkap	:	
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:	
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:	
4.	Nama Instansi	:	
5.	Alamat Kantor	:	
		:	Kode POS :
6.	Alamat Rumah	:	
		:	Kode POS :
7.	Nomor Telpon	:	

C. DATA PENERIMA GRATIFIKASI			
1.	Nama Lengkap	:	
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:	
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:	
4.	Nama Instansi	:	
5.	Alamat Kantor	:	
		:	Kode POS :
6.	Alamat Rumah	:	
		:	Kode POS :
7.	Nomor Telpon	:	
8.	Jenis Gratifikasi yang diterima	:	
		:	
		:	
9.	Harga/Nilai/Nominal/Taksiran Gratifikasi yang diterima	:	
10.	Tempat, Waktu dan tgl. Penerimaan Gratifikasi	:	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian ”	
Kronologi Penerimaan”	
Dokumen yang dilampirkan” *tidak ada : *ada yaitu :	
Catatan tambahan (bila Perlu)” :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Negara,..... 20..
Pelapor

(.....)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan/Pangkat/Gol :
Instansi :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Nomor Telp :

Dengan ini menyatakan saya tidak menerima, tidak memberi dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas/kewajiban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila saya melanggar pernyataan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara,
Yang membuat pernyataan/Ybs

(_____)

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA